

**JUDUL : PERBUATAN PIDANA PRODUSEN KOSMETIK YANG TIDAK
MENDAFTARKAN DAN TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL
KADALUWARSA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama : Christina Shintya Hapsari

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S., Ida Sampit Karo Karo S.H.,
CN.

ABSTRAK

Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku produsen kosmetik (KIL) yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ditinjau berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus produsen kosmetik (KIL) tersebut yang dalam dakwaan Penuntut Umum mendasarkan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan padahal beredarnya kosmetik ilegal ini berpotensi merugikan konsumen dengan melanggar hak – hak konsumen yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dan juga melanggar ketentuan – ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kosmetika, Kesehatan

**TITLE: PERBUATAN PIDANA PRODUSEN KOSMETIK YANG TIDAK
MENDAFTARKAN DAN TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL
KADALUWARSA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Name: Christina Shintya Hapsari

Discipline / Study Program: Ilmu Hukum

Contributor : Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S., Ida Sampit Karo Karo S.H.,
CN.

ABSTRACT

This thesis is intended to analyze the actions carried out by cosmetics producers (KIL) who deliberately did not register and did not include an expiry date to be reviewed according to the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is normative juridical. The results of this study concluded that in the case of the cosmetics manufacturer (KIL) which in the Public Prosecutor's indictment was based on Article 197 jo Article 106 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 36/2009 on Health whereas the circulation of illegal cosmetics had the potential to harm consumers by violating the right - consumer rights specified in Article 4 of the Consumer Protection Act and also violates the provisions in the Consumer Protection Act, namely Article 8 of the Consumer Protection Act.

Keywords : Consumer, Consumer Protection, Cosmetics, Cosmetics, Health